

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. (2020). *Tentang Indeks Desa Membangun*. Diambil kembali dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia: <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Bagaimana Penggunaan Dana Desa*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa>
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 142 Tahun 2020 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Indeks Desa Membangun*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.

Prawiro, M. (2018). *Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek, dan Contoh Efektivitas*. Diambil Kembali dari Maxmanroe.com: <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Wijayati, H. (2018, Maret 9). *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Diambil kembali dari CSWS FISIP UNAIR: <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>